



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2019
KABUPATEN MUNA BARAT 2019



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKjIP Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2019 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Laworo, Februari 2020

Kepala Bappeda Kab. Muna Barat,



RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd.,M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bappeda Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kab. Muna Barat yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja Bappeda Kab. Muna Barat yang dihasilkan di tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat pada tahun 2019 adalah 96,78%, yang didasarkan capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cepat Tumbuh, capaian kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda, dan tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.
2. Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cepat Tumbuh dengan indikator Jumlah perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten dan cepat tumbuh sebesar 100%,
3. Capaian kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda sebesar 102,88%. Indikator Kinerja sasaran ini ada 3 (tiga) yakni Nilai Evaluasi Sakip Bappeda tahun sebelumnya dengan capaian 107,69%, rata-rata nilai realisasi SKP ASN Bappeda dengan capaian 100,96%, tindaklanjut hasil temuan LHP BPK dan APIP dengan capaian 100%
3. Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan 12 (dua) belas komponen/sub indikator adalah sebesar 100%,

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda Kab. Muna Barat ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan;
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif dan spasial.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Kab. Muna Barat dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ii
 BAB I Pendahuluan	
1.1. Struktur Organisasi.....	1
1.2. Fungsi dan Tugas	3
1.3. Isu-Isu Strategis.....	4
1.4. Keadaan Pegawai.....	4
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana	7
1.6. Keuangan.....	11
1.7. Sistematika LKjIP	11
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis.....	13
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	23
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan	24
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	26
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019.....	27
2.3.1. Target Belanja Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2019	27
2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	28
2.4 Instrumen Pendukung	29
2.4.1. Sistem Informasi Manajemen Daerah Perencanaan (SIMDAREN).....	29
2.4.2. Aplikasi KRISNA	31
2.4.3. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	32
2.4.4. Sistem Informasi Manajemen Analisis Standar Belanja (SIM ASB)	34
2.4.5. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPDA)	35
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019	37
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	38
3.2.1. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh	39

3.2.2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	40
3.2.3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda	56
3.3. Realisasi Anggaran	58
3.4. Analisis Efisiensi.....	60
BAB IV PENUTUP	
4.1. Simpulan.....	61
4.2. Saran	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Kondisi dan Kebutuhan ASN Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2019.....	5
Tabel 1.2. Kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 menurut Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3. Kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 menurut Jenjang Kepangkatan	6
Tabel 1.4. Kondisi Pegawai Honorer Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 menurut Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.5. Jumlah Aset Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019	7
Tabel 1.6. Kondisi Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019.....	10
Tabel 1.7. Capaian Realisasi DPA-P Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019.....	11
Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.....	15
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda	23
Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.....	24
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019.....	27
Tabel 2.5. Target Belanja Bappeda Kabupaten Muna Barat APBD Perubahan Tahun 2019	28
Tabel 2.6. Ringkasan Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019	28
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	37
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Bappeda Muna Barat Tahun 2019.....	37
Tabel 3.3. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 Menurut Program	38
Tabel 3.4. Sasaran, Indikator, dan Formulasi Pengukuran Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019	39
Tabel 3.5. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh Triwulan I, II, III, dan IV dan Tahunan Tahun 2019	39
Tabel 3.6. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh Tahun 2019.....	40
Tabel 3.7. Sasaran, Indikator, dan Meta Indikator Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019	40

Tabel 3.8.	Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2019	42
Tabel 3.9.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019	43
Tabel 3.10.	Hasil Pengukuran 12 Komponen Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2019	44
Tabel 3.11.	Analisis Perhitungan Indikator % Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	45
Tabel 3.12.	Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Triwulan I, II, III, IV pada Tahun 2019	56
Tabel 3.13.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Tahun 2019.....	57
Tabel 3.14.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019	59
Tabel 3.15.	Analisis efisiensi Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019.....	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kab. Muna Barat.....	2
Gambar 2.1. Tampilan Halaman Depan Aplikasi Simda Perencanaan.....	30
Gambar 2.2. Tampilan Halaman Depan Aplikasi KRISNA	31
Gambar 2.3. Tampilan Halaman Depan Aplikasi SIPD Kabupaten Muna Barat	33
Gambar 2.4. Tampilan Halaman Depan Aplikasi SIM ASB Kabupaten Muna Barat	35
Gambar 2.5. Tampilan Halaman Aplikasi SIPPDA	36
Gambar 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019	43

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Renstra 2017-2022
- Lampiran 2. Peraturan Bupati Muna tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019
- Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun 2018
- Lampiran 6. Penghargaan yang Pernah Diterima
- Lampiran 7. Surat Edaran Bupati Muna Barat tentang Penyusunan LKjIP Tahun 2019

BAB I

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2019 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kab. Muna Barat
2. Mendorong Bappeda Kab. Muna Barat didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kab. Muna Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda Kab. Muna Barat di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

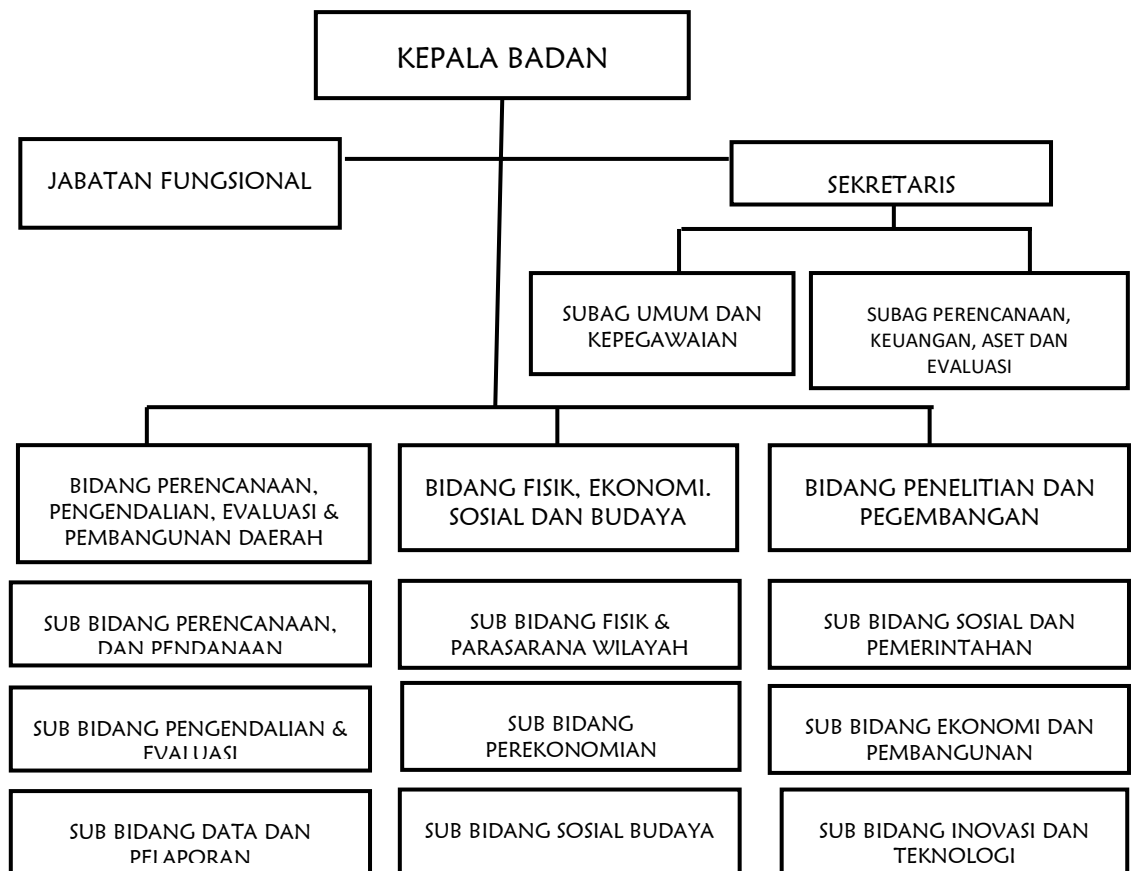
1.1. Struktur Organisasi

Bappeda Kab. Muna Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat. Bappeda Kabupaten Muna Barat diklarifikasikan dalam Tipe B yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Peraturan daerah No. 1 tahun 2016 tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Muna No. 20 tahun 2017, susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Muna Barat terdiri dari (i) Sekretariat, (ii) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah, (iii) Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan (iv) Bidang Penelitian dan

Pengembangan; Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari: (a) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi, dan (b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah terdiri dari: (a) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan, (b) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan (c) Subbidang Data dan Pelaporan. Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari (a) Subbidang Fisik dan Prasarana Wilayah, (b) Subbidang Perekonomian, dan (c) Subbidang Sosial Budaya. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari: (a) Subbidang Sosial dan Pemerintahan, (b) Subbidang Ekonomi dan Pembangunan, dan (c) Subbidang Inovasi dan Teknologi. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, yang merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang, yang merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kab. Muna Barat

1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 tahun 2017, Bappeda Kabupaten Muna Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut Bappeda Kab. Muna Barat mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda Kab. Muna Barat senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda Muna Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yang pertama adalah para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dan yang kedua adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan. Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pemerintah dan masyarakat (termasuk di dalamnya wakil rakyat). Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah proses politisnya (dibanding teknokratisnya). Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda Kab. Muna Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Bappeda Kabupaten Muna Barat, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; dan
3. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan.
4. Penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan masih minim baik dari segi kuantitas data maupun kualitas data.

Permasalahan pokok terkait dengan penyelenggaraan urusan penelitian yaitu:

1. belum tersedianya Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
2. minimnya kajian dan penelitian berkaitan dengan permasalahan pembangunan daerah

1.4. Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bappeda yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penilitiann sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan daerah No. 1 tahun 2016 tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat, Bappeda Kabupaten Muna Barat di dukung oleh 11 Orang ASN. Pemenuhan jumlah ASN Bappeda pada tahun 2019 hanya mencapai 28%. Minimnya keterpenuhan ASN juga diikuti dengan minimnya kompetensi ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas. Untuk memenuhi kebutuhan Pegawai dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung pelaksanaan penunjang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, maka dilakukan perekrutan pegawai honorer sebanyak 12 orang dan diikuti dengan peningkatan kapasitas kompetensi ASN melalui penyelenggaraan BinteK Perencanaan Pembangunan Daerah. Gambaran kondisi dan kebutuhan ASN Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2019 ditunjukkan pada table 1.1.

Tabel 1.1.
Kondisi dan Kebutuhan ASN Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2019

No	Eselon	Kebutuhan ASN	Jumlah ASN Yang ada	Persen Pemenuhan
1	Eselon IIb	1	1	100%
2	Eselon IIIa	1	1	100%
3	Eselon IIIb	3	3	100%
4	Eselon IVa	11	3	27%
5	Staf	24	3	13%
	Jumlah	40	11	28%

Berdasarkan latar belakang pendidikan, ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat didominasi oleh ASN dengan latar belakang pendidikan terakhir S2 sebanyak 54,54%, S1 sebanyak 27,27% dan tamatan SMA sederajat sebanyak 18,18%. Tingginya ASN dengan latar belakang pendidikan S2 menjadi salah satu faktor penting dalam menyelesaikan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat di tengah minimnya jumlah ASN. Secara ringkas kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat tahun 2019 menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.2.
Kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019
menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	L	P	Proporsi Perempuan (%)	Persen Pendidikan
Sekolah Menengah Umum (SMU)	2	2	0	0	18,18
Diploma III	0	0	0	0	0,00
Diploma IV	0	0	0	0	0,00
Sarjana Strata 1	3	2	1		
- Jurusan Kehutanan	2	1	1	9,09	18,18
- Jurusan Teknik	1	1	0	0	9,09
Sarjana Strata 2	6	6	0		
S2 Bidang Ilmu Lingkungan	2	2	0	0	18,18
S2 Bidang Penginderaan Jauh	2	2	0	0	18,18

Pendidikan Terakhir	Jumlah	L	P	Proporsi Perempuan (%)	Persentase Pendidikan
S2 Bidang Ilmu Pembangunan	1	1	0	0	9,09
S2 Bidang Ilmu Manajemen	1	1	0	0	9,09
JUMLAH	11	10	1	9,09	100

Latar belakang pendidikan S1 dan S2 sebagaimana table II.2 di atas, sudah sesuai dengan kebutuhan Bappeda Kabupaten Muna Barat. Guna menghadapi tantangan kedepan, khususnya berkaitan dengan tuntutan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik ditengah perkembangan industri 4.0, Bappeda Kabupaten Muna Barat terus melakukan upaya untuk meningkatkan skill dan ketrampilan para pegawai dalam penguasaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah serta upaya peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme khususnya bidang Perencanaan Pembangunan melalui Pendidikan, kursus-kursus, diklat-diklat teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Jenjang Kepangkatan, komposisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat terdiri dari Golongan IV sebanyak 27,27%, Golongan III sebanyak 54,54%, dan golongan II sebanyak 18,18%. Kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 menurut Jenjang Kepangkatan ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 1.3
Kondisi ASN Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019
menurut Jenjang Kepangkatan

Pangkat/ Golongan	Ruang / Jumlah (orang)					
	A	B	C	D	Jumlah	Proporsi (%)
Golongan I	0	0	0	0	0	0
Golongan II	0	0	0	2	2	18,18
Golongan III	1	0	3	2	6	54,54
Golongan IV	2	0	1	0	3	27,27
JUMLAH					11	100

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda dibantu oleh pegawai sebanyak 12 orang. Adapun tugas pegawai honer adalah menjaga keamanan kantor, menjaga kebersihan kantor, membantu pelaksanaan administrasi keuangan dan membantu penyelesaian administrasi perkantoran

lainnya. Kondisi pegawai honorer Bappeda Kabupaten Muna barat Tahun 2019 menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan ditunjukan pada table berikut.

Tabel 1.4.
Kondisi Pegawai Honorer Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019
menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	L	P	Proporsi Perempuan (%)	Persentase Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	1	1	50	16.67
Sekolah Menengah Umum (SMU)	0	0	0	0	0
Diploma III	2	1	1	50	16,67
Sarjana – Strata 1	7	4	3	42,85	58,33
Sarjana – Strata 2	1	-	1	100	8,33
JUMLAH	12	6	6	50	100

Dari tabel 1.2 dan Tabel 1.4. di atas dapat dilihat bahwa di Bappeda Kabupaten Muna Barat sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai (ASN dan honorer) dari perempuan telah mencapai 30,44%, walaupun dicantumkan (1) khusus Foto ASN Bappeda dan (2) Foto ASN bersama Honorer

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh personil SDM yang terampil, tetapi juga apabila ketersediaan prasarana dan sarana yang digunakan memadai. Jumlah sarana dan prasarana Bappeda Muna Barat Tahun 2019 menurut nilai aset yang dimiliki terlihat pada tabel berikut.

Tabel. 1.5.
Jumlah Aset Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
1	Brandkas	1 Buah	35.000.000	Krisbow KW/20-94
2	Camera	1 Buah	12.000.000	Nikon
3	Dispencer	2 Buah	12.000.000	Royal / RCA2113BK
4	Filling Kabinet	10 Buah	20.000.000	Brother/ B.104
5	Filling Besi/Metal	8 Buah	20.700.000	Lion, Frontline, dan Brother

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
6	Genset	1 Buah	10.000.000	Amass
7	Hard Disk	1 Buah	1.400.000	Toshiba 1 tera
8	HDD External	6 Buah	8.400.000	Lion, Frontline, dan Brother
9	Jumbo S/S	1 Buah	2.750.000	isi 5 liter
10	Karpet	1 Buah	3.000.000	
11	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11 Buah	272.540.000	2 Unit Yamaha/New Byson F1, 2 Unit Yamaha/X-Ride, 5 Unit Yamaha New Vixion, 2 Unit Yamaha AEROX 125 LC
12	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3 Buah	762.600.000	1 Buah Inova/ 2.0 G, 1 Buah Suzuki New Ertiga Dreza GS 2017, dan 1 Buah Suzuki New Ertiga Dreza GS AT 2017
13	AC	1 Buah	5.000.000	LG 1/2 PK
14	Kipas Angin	10 Buah	15.000.000	6 Unit Miyako / KST-18 RC, dan 4 Unit Merek Midea
15	Laptop/Komputer PC	16 Buah	232.230.000	2 Unit Komputer Merek Lenovo / C Series, 2 Unit Leptop Merek HP, 6 Unit Leptop Merek Asus A455L, 2 Unit Merek Asus Transformer 3, dan 3 Unit Laptop merek Asus Vivobook/5430U
16	Kursi Kerja	14 Buah	42.750.000	2 Unit Merek Activ furnitura, 4 Unit Merek Frontline, 5 Unit Merek Xieqiang, dan 3 Unit Kursi Merek Indachi
17	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	5 Buah	14.993.571	
18	Lensa Zoom Kamera	1 Buah	34.350.000	

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
19	Meja Kerja/Biro	20 Buah	44.800.000	4 Unit Merek Olympic, 13 Unit Merek Vook
20	Mesin Ketik Listrik Portable	2 Buah	6.191.384	Merek Brother / GX - 6750
21	Peralatan Jaringan Lokal	1 Unit	20.000.000	
22	Peralatan Jaringan Server Simda Perencanaan	1 Unit	147.600.000	HP Server DL-380 Gen 9ES-2620V4
23	Printer	23 Buah	122.605.000	4 Merek HP Laser Jet P 1102, 3 Merek Epson L 120, Multifungsi / L210, 3 Merek Epson L220, Epson L 120, Epson L1300, 4 Merek Epson L310, 3 Merek EPSON L385, 4 Merek HP Officejet250 Mobilleall-In-One
24	Proyektor	5 Buah	68.000.000	2 Unit Merek Sony / VPL EX225, 2 Unit Merek LG Minibeam Nano, 1 Unit Merek Epson EB-1795F
25	Scaner Portable	1 Buah	3.250.000	Scansanp S1100
26	Sova	1 Unit	10.000.000	Inova
27	Sound System	1 Buah	25.000.000	BMB/CS-550V MK II
28	Televisi, Antena dan Raciver	1 Buah	15.000.000	Sony, Indovision
29	Tenda Kerucut	1 Buah	15.000.000	
30	Uninterruptible Power Supplay (UPS)	5 Buah	10.000.000	ICA / IK 1300
31	Betacam Recorder/Player	1 Buah	15.000.000	Sony =1 Buah
32	Wireless	1 Buah	15.000.000	TOA
33	GPS	3 Buah	24.000.000	Garmin 680 = 3 Buah,
	Jumlah		2.046.159.955	

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda Kabupaten Muna Barat sejauh ini dirasa cukup memadai untuk menunjang kinerja. Secara lebih rinci, perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Bappeda Kabupaten Muna Barat yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran tugas-tugas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I. 6
Kondisi Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Muna Barat
Tahun 2018-2019

No	Uraian	Jumlah		Keterangan/ Kondisi
		2018	2019	
1	Bangunan Gedung	1	1	Lokasi dan Gedung kantor milik SMP
2	Kendaraan Dinas Roda 4	1		Mobil Tipe Inova/ 2.0 G sebanyak 1 Buah, 1 Buah Suzuki New Ertiga Dreza GS 2017, dan 1 Buah Suzuki New Ertiga Dreza GS AT 2017, semua dalam kondisi baik
3	Kendaraan Dinas Roda-2	11	-	Kendaraan roda dua sebanyak 2 Buah merek Yamaha/New Byson F1, 2 Buah Yamaha/X-Ride, 5 Buah Yamaha New Vixion, dan 2 Buah Yamaha AEROX 125 LC semua dalam kondisi baik
4	Sistem Informasi	1		Sitem Informasi
5	Komputer Desktop	2		Komputer Desktop Tipe Lenovo / C Series sebanyak 2 unit kondisi baik
6	Laptop	14		Laptop Tipe HP sebanyak 2 buah, 6 Buah Leptop Merek Asus A455L, 2 Buah Merek Asus Transformer 3, dan 3 Buah Laptop merek Asus, dan 1 Buah Tipe Vivobook/5430U, kesemua unit laptop dengan kondisi Baik
7	Printer	23		Printer terdiri dari Printer Merek HP Laser Jet P 1102 sebanyak 4 Buah, 3 Merek Epson L 120, 1 Merek Epson L210, 3 Merek Epson L220, 1 Merek Epson L1300, 4 Merek Epson L310, 3 Merek EPSON L385, dan 4 Merek HP Officejet250 Mobilleall-In-One
8	Jaringan Telekomunikasi			Jaringan telekomunikasi meliputi Jaringan Simda Perencanaan dan Jaringan Lokal

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda Kabupaten Muna Bara. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat pada tahun 2019 berasal dari APBD Kabupaten Muna Barat Tahun 2019. Pada Tahun Anggaran 2019, Bappeda Kabupaten Muna Barat melalui APBD-P Tahun 2019 yang dijabarkan dalam DPA-P Bappeda Muna Barat Tahun 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.001.839.000,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 950.839.000,- atau 13,58% dari total belanja dan belanja langsung sebesar Rp. 6.051.000.000,- atau 86,42% dari total belanja.

Raliassasi belanja tahun 2019 sebesar Rp. 6.702.749.239,- atau 95,73% dari target belanja. Raliassasi belanja terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 884.766.001,- atau 13,20% dari target belanja tidak langsung dan ralisasi belanja langsung sebesar Rp. 5.817.983.238,- atau 86,80% dari target belanja langsung.

Capaian realisasi DPA-P Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 terlihat pada table berikut.

Tabel 1. 7
Capaian Realisasi DPA-P Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019

No	Uraian	Target DPA-P 2019 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
A	PENDAPATAN	0	0	0
B	BELANJA	7.001.839.000	6.702.749.239	95,73
1	Belanja Tidak Langsung	950.839.000	884.766.001	93,05
	Belanja Pegawai:			
a	Gaji/ Tunjangan	819.239.000	787.466.001	96,12
b	Tambahan PP	131.600.000	97.300.000	73,94
2	Belanja Langsung	6.051.000.000	5.817.983.238	96,15
a	Belanja Pegawai	642.800.000	584.883.000	90,99
b	Belanja Barang	4.637.200.000	4.477.100.238	96,55
c	Belanja Modal	771.000.000	756.000.000	98,05

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 memuat Ringkasan Eksekutif dan Penjelasan Bab.

Ringkasan Eksekutif memuat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan

dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Pada bagian ini disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I berisi pendahuluan yang memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD, dan Sistematika penulisan LKjIP.

Bab II berisi Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang memuat gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja yang memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, serta menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pada bagian ini disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disamping itu, disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

Bab IV berisi **penutup**. Bagian ini memuat simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

Lampiran adalah bagian akhir dari sistematika penulisan yang memuat antara lain Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat,

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2019, Bappeda Kabupaten Muna Barat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022. Renstra Bappeda Kabupaten Muna Barat merupakan manifestasi komitmen Bappeda Kabupaten Muna Barat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022. Perumusan Renstra Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat No. 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Renstra Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Kabupaten Muna Barat Nomor 89 Tahun 2017 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kab. Muna Barat Tahun 2017-2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan wakil Bupati Muna Barat terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Muna Barat. Pernyataan visi RPJMD Kabupaten Muna Barat periode 2017-2022 menjadi arah bagi pembangunan sampai tahun 2022. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Muna barat sampai dengan Tahun 2022 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022, adalah

**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT MUNA BARAT YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS,
PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DENGAN DILANDASI OLEH NILAI-NILAI
RELIGIUS"**

Visi di atas mengandung beberapa pokok kata kunci yakni SEJAHTERA, DEMOKRATIS, PRODUKTIF, BERDAYA SAING, DAN RELIGIUS.

- **SEJAHTERA**, merefleksikan peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah Muna Barat yang berkeadilan ditopang oleh pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada agropolitan dan minapolitan.
- **DEMOKRATIS**, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terefleksikan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, tata kelola keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan kehidupan kemasyarakatan, berbangsa, bernegara yang harmonis dan toleran.
- **PRODUKTIF**, merefleksikan pembangunan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, Sehat, Produktif, Inovatif, Berkarakter dan Berbudi Pekerti Luhur dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asia.
- **BERDAYA SAING**, merefleksikan keberadaan infrastruktur Wilayah yang memadai dan berkualitas dalam mendukung Penataan dan daya saing pengembangan Wilayah khususnya pada pengembangan Pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pembangunan Desa, dan Pulau-Pulau Kecil; **BERDAYA SAING** juga merefleksikan pengelolaan Pariwisata dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta Pelestarian/ pengembangan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal
- **RELIGIUS**, merefleksikan masyarakat Kabupaten Muna Barat memiliki jati diri sebagai insan yang berbudaya, Berkarakter, Berbudi Pekerti Luhur, dan berakhlak mulia dalam menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama yang harmonis dan toleran.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Untuk mewujudkan visi, mewujudkan Muna Barat yang bersih, berdaya saing, bermartabat, dan sejahtera, maka upaya-upaya yang akan dilaksanakan termuat dalam 5 (lima) Misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur
- 2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas
- 3) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan
- 4) Mengembangkan potensi wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Muna kabupaten Barat Tahun 2017-2022 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022

Visi: Terwujudnya Masyarakat Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Religius”

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia Kreatif, Sehat, Produktif, Inovatif, Berkarakter dan Berbudi Pekerti Luhur	1. Meningkatkan layanan dan pemenuhan hak-hak dasar Pendidikan, Kesehataan, dan kesejahteraan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia	1. Terpenuhinya hak dasar masyarakat terhadap akses layanan Pendidikan yang berkualitas	Angka rata-rata lama sekolah
				2. Terpenuhinya hak dasar masyarakat terhadap akses layanan Kesehatan yang berkualitas	Angka harapan hidup
				3. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terhadap layanan Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persen Masyarakat diata Garis Kemiskinan
				4. Meningkatnya pelayanan upaya pengurangan resiko bencana	Rata-rata capaian SPM penang-gulangan bencana

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		2. Meningkatkan Minat baca Masyarakat melalui Penyediaan layanan Perpustakaan	Angka Melek Huruf	5. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Kecerdasan Penggunaan Media Elektronik	Angka Melek Huruf
		3. Meningkatkan Prestasi Atlit Olahraga dan budaya berolahraga	Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Provinsi/ Regional/ Internasional	6. Meningkatnya Budaya Olahraga dan prestasi Olahraga	Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Provinsi/ Regional/ Internasional
		4. Meningkatkan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dan organisasi kepemudaan	Persen Organisasi kepemudaan yang aktif	7. Meningkatnya Motivasi dan Peran Kepemudaan dalam mendorong daya saing pembangunan daerah	Persen Organisasi kepemudaan yang aktif
		5. Meningkatkan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	8. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		6. Memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Indeks Derajat Keberdayaan Masyarakat (IDK)	9. Meningkatnya swadaya/partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan	Indeks Derajat Keberdayaan Masyarakat (IDK)
		7. Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tingkat pertumbuhan penduduk	10. Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Kualitas Keluarga Berencana, dan Kesejahteraan Keluarga	Tingkat pertumbuhan penduduk

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		8. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja dalam menghadapi Persaingan Pasar Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi Asia		11. Meningkatnya Kompetensi Keahlian dan keterampilan Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (IKK)
				12. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	% perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
				13. Meningkatnya akses Kesempatan Kerja dan Peluang Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja
II	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Wilayah Yang Memadai dan Berkualitas	9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung Penataan dan Pengembangan Wilayah	Indeks Daya Saing Infrastruktur	14. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah dalam mendukung Pengembangan Wilayah dan pemerataan Pembangunan	Indeks Daya Saing Infrastruktur
				15. Meningkatnya Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh	Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempatb Tumbuh
				16. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rasio Rumah layak huni

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				17. Meningkatnya efisiensi pemanfaatan ketenagalistikan dan Bahan Bakar Minyak	Rasio eletrifikasi
				18. Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Rencana Tata Ruang yg berkelanjutan	Tingkat kepatuhan RTRW
				19. Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan Persampahan yang berkelanjutan	% Timbulan sampah yang ditangani
III	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Agropolitan Dan Minapolitan	10. Meningkatkan Produksi dan produktivitas kemampuan pengelolaan Ekonomi Kerakyatan berbasis Agropolitan dan Minapolitan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	20. Meningkatnya kapasitas produksi dan produktifitas sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan dalam upaya mendorong kesejahteraan petani dan kedaulatan serta ketahanan pangan daerah	% Peningkatan produksi pertanian
				21. Meningkatnya Produksi dan produktivitas kemampuan pengelolaan Potensi Perikanan dan Kelautan	% Peningkatan produksi perikanan
				22. Meningkatnya Nilai Tambah kemampuan pengelolaan	% Peningkatan Nilai tambah perikanan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				Potensi Perikanan dan Kelautan	
		11. Meningkatkan Akses Pasar Produk Ekonomi Lokal	Persen hasil pertanian yang terserap pasar	23. Meningkatnya Kemampuan Pasar menyerap Produk Sektor-Sektor Unggulan Daerah dengan Harga yang kompetitif	Persen hasil pertanian yang terserap pasar
				24. Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan barang Penting	Tingkat Inflasi
				25. Meningkatnya kemudahan akses terhadap Input Produksi dan Barang Kebutuhan Pokok	Persen pemenuhan input pupuk bersubsidi dan barang kebutuhan pokok
				26. Meningkatkan Standardisasi dan perlindungan Konsumen	% penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sesuai standar
				27. Meningkatnya kualitas pelayanan Pendaftaran Perusahaan	Rata-rata waktu penyelesaian layanan pendaftaran perusahaan (Hari)

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		12. Meningkatkan Peran Koperasi dan UMKM dalam membangun Ekonomi Lokal,	Persen pelaku UMKM yang meningkat skala usahanya	28. Meningkatnya Pelaku UMKM dalam membangun perekonomian lokal	% Peningkatan pelaku UMKM
				29. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi untuk menopang perekonomian lokal	% Koperasi Aktif
		13. Mengembangkan Peran industri dalam peningkatan nilai tambah komoditi sektor-sektor unggulan dan Jasa	Kontribusi Sektor Industri terhdap PDRB	30. Meningkatnya Peran Industri Sektor Unggulan Daerah dalam pengembangan ekonomi Lokal	Kontribusi Sektor Industri terhdap PDRB
				31. Meningkatnya kualitas pelayanan Peizinan Usaha Industri	Rata-rata waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan (Hari)
				32. Meningkatkan Keterpaduan Sistem Informasi Industri Nasional	% Industri yang menyampaikan data melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
		14. Meningkatkan Iklim Investasi yang berkelanjutan	Nilai investasi PMDN dan PMA	33. Meningkatnya peran Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) dalam	% peningkatan pelaku UMKM

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				pengembangan ekonomi lokal	
				34. Meningkatnya kualitas pelayanan dan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan	Nilai investasi PMDN dan PMA
IV	Mengembangkan Potensi Wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya sesuai dengan kearifan local	15. Memantapkan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Kontribusi pendapatan Pariwisata terhadap PAD	35. Terwujudnya pengelolaan Pariwisata berkelanjutan	% Peningkatan jumlah pengunjung wisata
				36. Meningkatnya ragam ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan hak kekayaan Intelektual	Persen peningkatan pelaku ekonomi kreatif
		16. Mengembangkan pelestarian dan pengelolaan Budaya Daerah	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	37. Terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya
		17. Meningkatkan Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	38. Terwujudnya pengelolaan LH secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
V	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan	18. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif,	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	39. Meningkatnya tingkat kepuasan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat	transparan dan bermartabat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		19. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Indeks Integritas Instansi Pemerintah	40. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten
				41. Meningkatnya Kinerja Aparat pengawas internal pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP
		20. Meningkatkan semangat persatuan, kesatuan dan toleransi dalam Kehidupan Berbangsa, dan Bernegara	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	42. Meningkatnya nilai demokrasi dan Persatuan berbangsa dan Bernegara	Persentase Potensi gangguan SARA yang diselesaikan
		21. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka kriminalitas	43. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum berbasis prakarsa dan Kemitraan bersama antara Pemerintah dan Masyarakat	Angka kriminalitas

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Muna Barat selama 5 tahun anggaran, adalah:

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pendukung Penataan dan Pengembangan Wilayah
- 2) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat
- 3) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

B. Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut

- 1) Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cepat Tumbuh
- 2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda
- 3) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda di presentasikan dalam tabel sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pendukung Penataan dan Pengembangan Wilayah		Jumlah Kawasan Strategis Kabupaten yang terbangun sesuai masterplan	2	2	2	3	3	3
	Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten	2	2	2	3	3	3
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Nilai Anugerah Pangripta Nusantara	55	57	60	63	68	70

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	85%	90%	95%	100%	100%	100%
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat		Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda tahun sebelumnya	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
		Rata-rata capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	80	82	84	86	88	90
		Tingkat ketaatan terhadap hasil pemeriksaan BPK dan APIP	100	100	100	100	100	100

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran, perlu menentukan langkah untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Muna Barat. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pendukung Penataan dan Pengembangan Wilayah	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh	Opt Pembangualisasi perencanaan pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat tumbuh	Mengoptimalkan Perencanaan dan pembangunan Infrastruktur kawasan Minapolitan dan Agropolitan
			Mengoptimalkan Perencanaan dan meningkatkan pembangunan Infrastruktur kawasan Transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
Tujuan 2: Meningkatkan penyelenggaraan	Sasaran 2: Meningkatkan Akuntabilitas	Peningkatan Kinerja Birokrasi Modern dalam Penyelenggaraan	Optimalisasi dan efektifitas Pelayanan Perkantoran sesuai Standar Operasional dan Prosedur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat	Kinerja dan Keuangan Daerah	Pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai tuntutan kebutuhan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
			Meningkatkan pelayanan Administrasi kepegawaian secara otomatis
			Menegakan Displin ASN
			Meningkatkan Kompetensi dan Profesionlisme sumber daya aparatur daerah
			Meningkatkan Akuntabilitas Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan
			Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pengelolaan Perekonomian Daerah serta membentuk layanan Badan Usaha Milik Daerah
			Mengoptimalkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan, Monitoring, dan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Meningkatkan Efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) dalam perencanaan dan pengendalian/ evaluasi pembangunan tahunan dan jangka menengah
			Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan daerah secara terpadu, partisipatif, akuntabel, dan 25esponsive gender.
			Meningkatkan ketersediaan <i>Road Map</i> / Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Pembangunan Bidang Ekonomi
			Meningkatkan ketersediaan <i>Road Map</i> / Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
			Meningkatkan ketersediaan <i>Road Map</i> / Dokumen Perencanaan Lintas Sektor Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA
			Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Tim Work Aparat Perencanaan Pembangunan Daerah
		Peningkatan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dalam mendukung Kualitas Perencanaan pembangunan dan	Meningkatkan Kualitas Data Informasi Pembangunan Daerah
			Meningkatkan Kualitas Data Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara terpadu dengan melakukan updating secara berkala

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penyelenggaraan Pemerintahan lainnya	Mengembangkan kerjasama dengan BPS untuk penggandaan buku statistik dasar dalam mendukung ketersediaan data perencanaan pembangunan
			Mengembangkan statistik sektoral untuk mendorong ketersediaan data sektor yang akurat dan terkini
		Peningkatan Efektifitas Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang berorientasi pada Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah,	Meningkatkan efektifitas rekomendasi hasil-hasil Kajian/ Studi Penelitian untuk percepatan pembangunan Daerah dan pengembangan Wilayah
		Peningkatan Publikasi Data Publikasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengendalian/ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Web-Site Pemda	Mengoptimalkan Data Publikasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengendalian/ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Web-Site Pemda\

Sumber: Renstra Bappeda Muna Barat Tahun 2017-2022

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 mengacu pada Renstra Bappeda Muna Barat Tahun 2017-2022 RKT Bappeda Muna Barat Tahun 2019, IKU Bappeda Kabupaten Muna Barat, dan DPA Bappeda Muna Barat Tahun 2019. Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target 2019	Target Triwukan			
					I	II	III	IV
1	Meningkanya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh	Jumlah perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten yang terbangun sesuai masterplan	Unit	3	-	-	-	3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda	Nilai Evaluasi Sakip Bappeda tahun sebelumnya	Kategori	Baik	-	Baik	-	-
		Rata-rata capaian SKP-ASN Bappeda						
		Tingkat ketaatan terhadap hasil pemeriksaan BPK dan APIP						
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen lainnya	%	95%	-	-	92	95

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019, Bappeda Kabupaten Muna Barat melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 sebesar Rp 5.129.258.580,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 929.258.580,- dan Belanja Langsung 4.200.000.000,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi sebesar Rp 7.001.839.000,- Yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 950.839.000,- dan Belanja Langsung Rp 6.051.000.000,-.

2.3.1. Target Belanja Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Muna Barat menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 7.001.839.000 yang terdiri dari dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 950.839.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 6.051.000.000,- Target belanja Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 terlihat pada table berikut.

Tabel 2.5
Target Belanja Bappeda Kabupaten Muna Barat APBD Perubahan Tahun 2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Persentase (%)
A	PENDAPATAN	0	0
B	BELANJA	7.001.839.000	137
1	Belanja Tidak Langsung	950.839.000	102
	Belanja Pegawai:		
a	Gaji/ Tunjangan	819.239.000	103
b	Tambahan PP	131.600.000	100
2	Belanja Langsung	6.051.000.000	144
a	Belanja Pegawai	642.800.000	108
b	Belanja Barang	4.637.200.000	133
c	Belanja Modal	771.000.000	670

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Bappeda Kabupaten Muna Barat yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Ringkasan Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Ket.
1	Meningkanya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cepat Tumbuh	0	0	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda	2.549.600.000	155	
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	3.501.400.000	137	
	Jumlah	6.051.000.000	144	

2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Muna Barat.

Bappeda Kabupaten Muna terus berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Bappeda Kabupaten Muna Barat telah membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 sudah cukup memadai dan telah tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiF tersambung walaupun belum dalam jaringan Local Area Network (LAN). Kedepan, diharapkan akan dibangun integrasi data yang disimpan dalam server yang terbagi dalam segmen-segmen bidang. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi perencanaan pembangunan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 membangun beberapa sistem informasi.

2.4.1. Sistem Informasi Manajemen Daerah–Perencanaan (SIMDAREN)

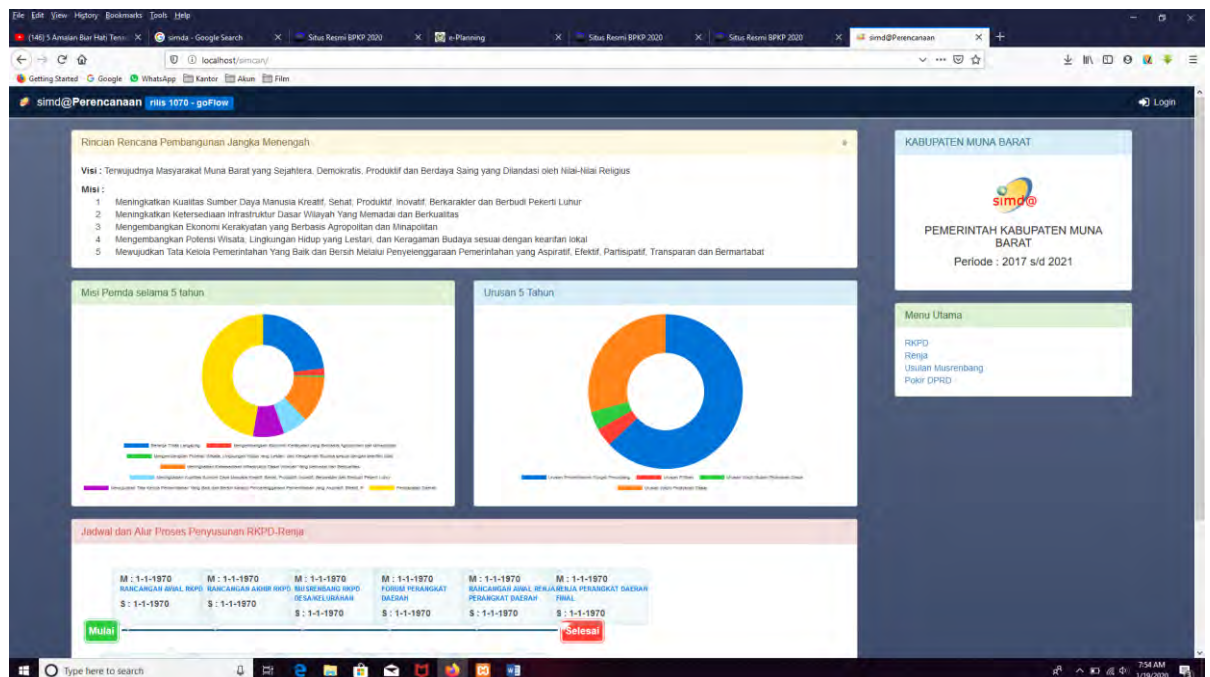
Simdaren adalah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah – Perencanaan. Aplikasi ini adalah sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana aplikasi ini sangat penting bagi pemerintah daerah terkhusus Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Kabupaten Muna Barat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*. Melalui implementasi SIMDA Perencanaan berbasis web diharapkan terwujud keselarasan, baik antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD/Renstra, RKPD/Renja), maupun keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan

penganggaran keuangan daerah (APBD dan DPA). Hal ini dimungkinkan karena SIMDA Perencanaan nantinya akan diintegrasikan dengan SIMDA Keuangan.

Manfaat dari implementasi Aplikasi Simdaren antara lain yaitu:

1. Membantu Bappeda dan OPD dalam merumuskan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan usulan yang ada dalam dokumen hasil musrenbang.
2. Membantu Bappeda dan OPD dalam penyusunan indicator kinerja yang terukur, sistematis dan berkesinambungan.
3. Membantu Bappeda dan OPD dalam menyusun dokumen perencanaan baik menengah maupun tahunan sesuai dengan indicator dan target kinerja yang telah disusun.
4. Membantu Bappeda dan OPD dalam publikasi dokumen perencanaan ke tingkat Daerah, Propinsi maupun Pusat.

Untuk mengakses Aplikasi ini sangat mudah dikarenakan aplikasi Simda Perencanaan berbasis web sehingga untuk mengaksesnya tidak membutuhkan *bandwidth* yang besar dan terpasang / *terinstall* pada computer server yang ada pada Bappeda. Aplikasi ini sangat *User friendly* maksudnya sangat mudah digunakan baik itu sebagai OPD yang akan menyusun Rencana Kerja maupun sebagai verifikator atau pun pemeriksa dari pihak Inspektorat karena dari segi tampilan sangat mudah dipahami. Untuk pengembangan Aplikasi ini Bappeda Kabupaten Muna Barat sudah memiliki IP-Publik sendiri sehingga Aplikasi ini sudah bisa diakses dari manapun yang terhubung dengan internet.

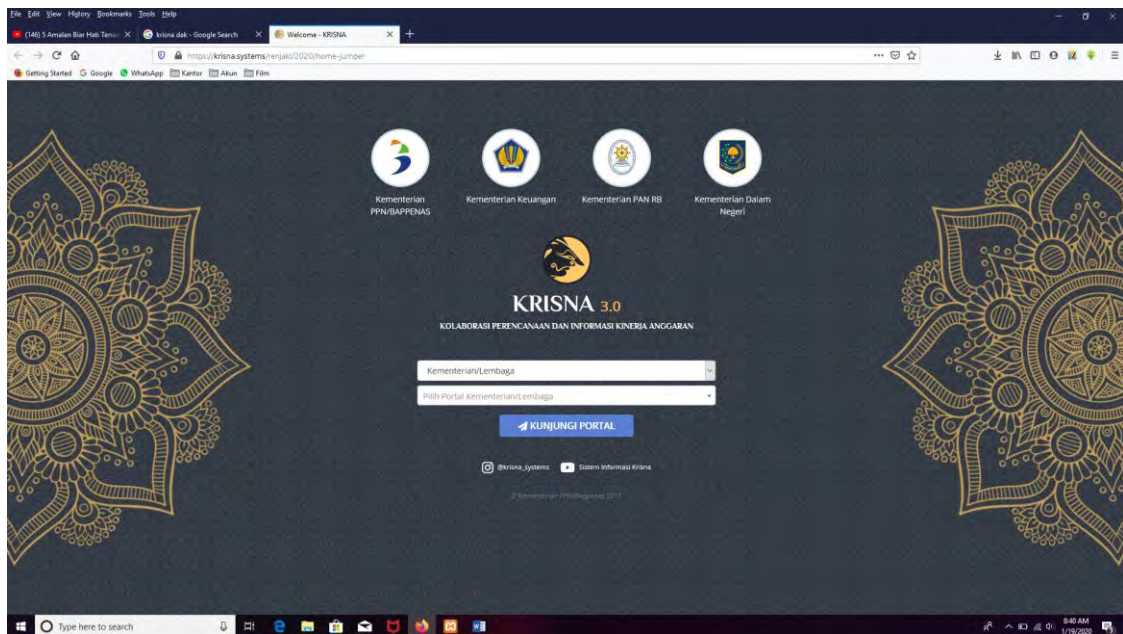


Gambar 2.1.
Tampilan Halaman Depan Aplikasi Simda Perencanaan

2.4.2. Aplikasi KRISNA

Aplikasi KRISNA adalah aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran merupakan aplikasi e-planning yang diinisiasi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB. Aplikasi ini mengintegrasikan platform perencanaan dan anggaran yang telah ada di Bappenas ke dalam satu sistem tunggal yang terkoneksi langsung ke dalam sistem aplikasi penganggaran di Kemenkeu.

Aplikasi KRISNA adalah Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang merupakan integrasi antara 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN RB yang dituangkan dalam bentuk sistem aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.



Gambar 2.2.
Tampilan Halaman Depan Aplikasi KRISNA

Dengan KRISNA, maka semua proses perencanaan dilaksanakan secara digital agar seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sampai dengan audit serta *feedback*, bagi perencanaan dilakukan secara integratif, transparan, akuntabel, dan *paperless*.

Adapun fungsi dan kegunaan aplikasi E-Krisna ini yaitu :

1. Sebagai alat bantu bagi Kementerian/Lembaga dalam proses penyusunan (input dan update) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
2. Sebagai alat bantu untuk melakukan pengecekan dan validasi terhadap data dan informasi dalam Rancangan Renja K/L bagi Kementerian PPN/Bappenas

dan DJA Kementerian Keuangan yang menjadi mitra kerja Kementerian/Lembaga.

3. Sebagai referensi untuk RKA KL Kementerian Keuangan dan Penilaian.

Aplikasi KRISNA ini terbagi menjadi 2 Jenis yaitu :

a. KRISNA-DAK

Krisna – DAK adalah aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

b. KRISNA – Selaras

Krisna – DAK adalah aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang sumber anggarannya berasal dari Rencana Kerja Kementerian / Lembaga terkait. Rencana Kerja Daerah yang tidak termasuk dalam kriteria DAK tetapi mendukung Program Prioritas Nasional bias diusulkan melalui Krisna – Selaras.

2.4.3. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

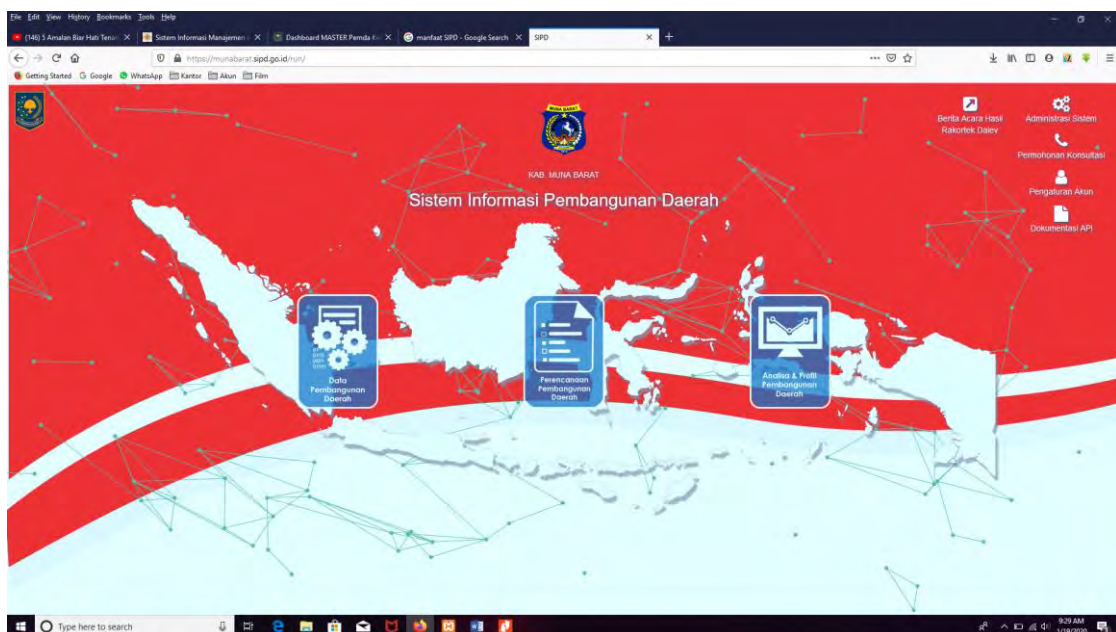
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dibuat dan dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan pengintegrasian dari e-Database, e-Planning, e-Monev, dan e-Reporting. SIPD ini merupakan amanat dari Pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Tujuan dari pengembangan SIPD ini untuk memastikan alur tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SIPD juga untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah serta antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Data SIPD terdiri dari 8 kelompok data (Data Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Ekonomi, Keuangan daerah, Politik/hukum/Keamanan dan Insidensial). Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta bahan penentu/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, karena

pada saat ini data-data pembangunan dipandang belum lengkap sehingga diperlukan suatu upaya untuk melengkapi dan senantiasa untuk memperbaruinya dengan pengumpulan data secara bertahap dengan mekanisme merubah dari pola secara manual ke pola elektronik.

Sedangkan SIPD sendiri memiliki manfaat untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terbaru untuk perencanaan pembangunan daerah, menjadi sistem penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri dalam pengendalian dan penyerasian pembangunan daerah, menjadi gerbang data dan informasi pembangunan daerah, serta merupakan akses data dan informasi berbagai kepentingan.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah diharapkan dapat mengurangi adanya potensi penyimpangan maupun celah korupsi selama proses penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. Berikut peningkatan efisiensi pengelolaan aplikasi karena Pemerintah Daerah tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan aplikasi dan mempermudah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah. Selain itu, SIPD dapat memastikan integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam dokumen perencanaan melalui fitur tagging indikator di dalam aplikasi.



Gambar 2.3.
Tampilan Halaman Depan Aplikasi SIPD Kabupaten Muna Barat

2.4.4. Sistem Informasi Manajemen Analisis Standar Belanja (SIM ASB)

Analisis Standar Belanja merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. *ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.*

Atas dasar untuk menilai kewajaran biaya dan beban kerja atas suatu kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka Bappeda Kabupaten Muna Barat bekerja sama dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada membangun sebuah system informasi untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran, Sistem itu adalah Sistem Informasi Manajemen Analisis Standar Belanja (SIM ASB). Aplikasi ini web base yang bisa diakses dari manapun selama terkoneksi jaringan internet.

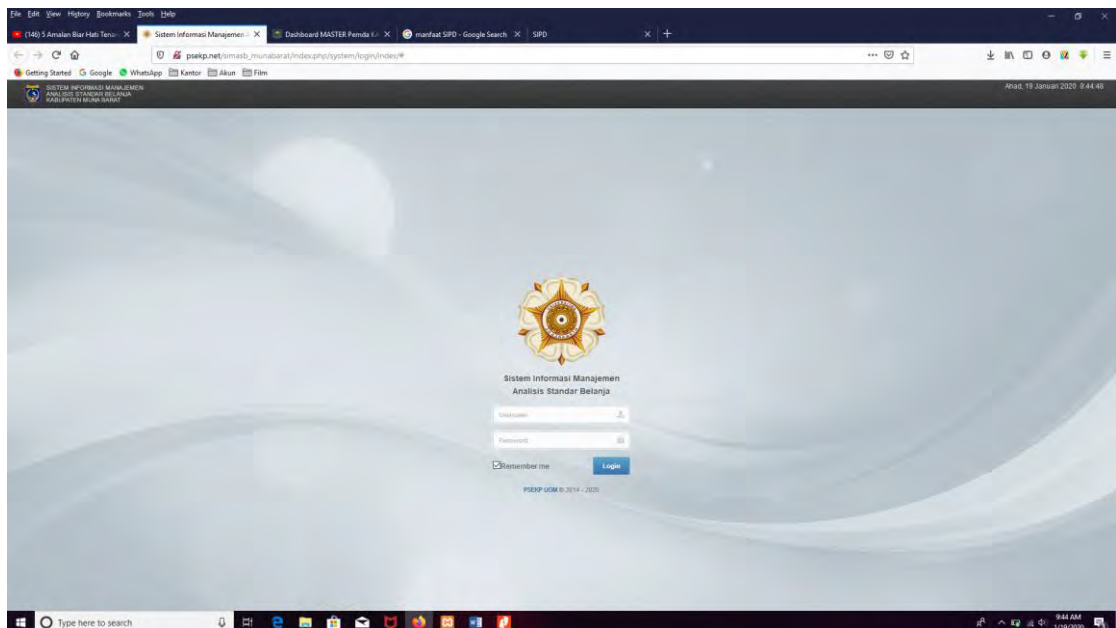
Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain:

1. Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya;
 2. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
 3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

Output atau keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen yang menyajikan informasin mengenai;

1. Instrumen Analisis Standar Belanja dan SIM ASB Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk program pelayanan administrasi perkantoran; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; dan program peningkatan kapasitas aparatur, serta kegiatan yang bersifat koordinasi dan sosialisasi.
2. Program/Aplikasi Sistem Informasi Analisis Standar Belanja (SIM-ASB) Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Sosialisasi Implementasi Analisis Standar Belanja dalam Perencanaan dan Penganggaran.

Pada Tahun 2018 telah dibangun Analisis Standar Belanja untuk Program dan Kegiatan yang bersifat rutin, sedangkan untuk tahun 2019 sudah dikembangkan Analisis Standar Belanja untuk Program dan Kegiatan yang bersifat Konstruksi.



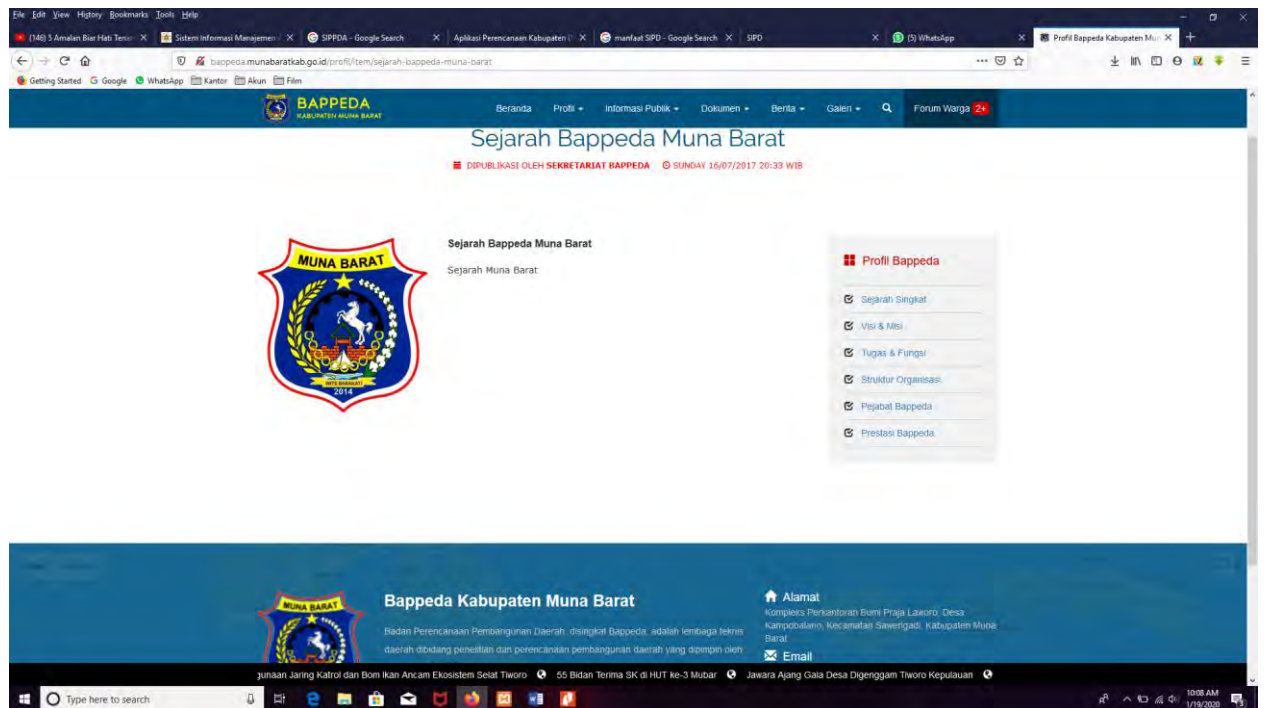
Gambar 2.4.

Tampilan Halaman Depan Aplikasi SIM ASB Kabupaten Muna Barat

Para Perencana setiap OPD diberikan kewenangan untuk menginput rencana kerjanya masing masing. Karena Sistem Aplikasi ini sudah memuat Standar Satuan Harga (SSH) maka keluaran dari Aplikasi ini sudah berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

2.4.5. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPPDA)

Sistem Aplikasi ini dibangun oleh Bappeda Kabupaten Muna Barat dan sementara dalam pengembangan. Aplikasi ini dibangun bertujuan untuk menyampaikan berita tentang pembangunan Kabupaten Muna Barat dan berita lain yang terjadi di seputaran Kabupaten Muna Barat, sehingga masyarakat luas dapat melihat pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Muna Barat. Aplikasi ini juga memuat Profil Bappeda Kabupaten Muna Barat mulai dari sejarah sampai dengan Prestasi Bappeda Kabupaten Muna Barat.



Gambar 2.5.
Tampilan Halaman Aplikasi SIPPDA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Bappeda Kabupaten Muna Barat telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikangambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Orange
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah Muda

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Muna Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Muna Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Bappeda Muna Barat Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Kriteria/ Kode
1	Meningkanya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh	Jumlah perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten yang terbangun sesuai masterplan	Unit	3	1	33,33	SR
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda	Nilai Evaluasi Sakip Bappeda tahun sebelumnya	Predikat/ Nilai	B (65)	B (72,17)	111,03	SB
3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen lainnya	%	95	90	94,74	SB

Bappeda Kabupaten Muna Barat memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Muna Barat. Pada tahun 2019, capaian realisasi target indikator sasaran tersebut rata-rata sebesar 64,21%, atau **melampaui/ belum melampaui** dari target yang ditetapkan.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam perencanaan jangka menengah program-program yang telah diselenggarakan dalam mendukung sasaran strategis Bappeda terlihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3.
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019
Menurut Program

No	Sasaran Strtegis/ Program	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi (%)
1	Meningkanya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh	0	0	0
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0	0	0
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	0	0	0
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda	2.549.600.000	2.407.086.909	94,41
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.380.100.000	1.252.006.909	90,72
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	890.500.000	876.104.000	98,38
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.000.000	8.976.000	99,73
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	270.000.000	270.000.000	100,00
3	Meningkatnya Kualitas Perencanan Pembangunan Daerah	3.501.400.000	3.439.458.703	98,23
	Program Pengembangan Data/Informasi	275.000.000	272.117.800	98,95
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	-	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000	349.052.900	99,73
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.271.400.000	2.216.455.203	97,58
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	-
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	225.000.000	223.982.800	99,55
	Program Pembangunan dan Penelitian Daerah	380.000.000	377.850.000	99,43

Program-program di atas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2018. Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Muna Barat yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cepat Tumbuh

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cepat Tumbuh diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut adalah Jumlah dokumen perencanaan yang dimanfaatkan untuk pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dan cepat tumbuh. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Sasaran, Indikator, dan Formulasi Pengukuran
Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Pengukuran
1	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen perencanaan yang dimanfaatkan untuk pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dan cepat tumbuh	Rencana pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang akan dibuat pada tahun 2019 sebanyak 1 dokumen, yang meliputi: Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum, dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten

Tabel 3.5.
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cepat Tumbuh Triwulan I, II, III, dan IV dan Tahunan Tahun 2019

No	Indikator	Triwulan				Tahunan
		I	II	III	IV	
1	Jumlah dokumen perencanaan yang dimanfaatkan untuk pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dan cepat tumbuh	0	0	0	1	1

Target kinerja dari sasaran Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh dengan indicator Jumlah dokumen perencanaan yang dimanfaatkan untuk pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dan cepat tumbuh pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) Dokumen yakni Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum, dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Target Kinerja dan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan
Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh
Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Target Tahun Awal Renstra (2017)	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s.d 2019 terhadap target 2022
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah dokumen perencanaan yang dimanfaatkan untuk pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dan cepat tumbuh	10 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100	35	14

3.2.2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanan Pembangunan Daerah

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanan Pembangunan Daerah diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut adalah Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen lainnya. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Sasaran, Indikator, dan Meta Indikator
Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Meta indikator
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Indikator sasaran pada tahun N yang tercapai / indikator sasaran RPJMD X 100% Rumusan Tingkat Konsistensi: [80% (A + B+C + D + E)/5] + 20% [(F+G +H+I+J+K+L)/7]

No	Sasaran	Indikator	Meta indikator
			Penjelasan: A = % Konsistensi Program RPJMD tahun rencana-(n+1) kedalam RKPD tahun-(n+1) B = % Konsistensi Program RPJMD ke dalam Renstra PD C = % Konsistensi Program/ Kegiatan Resntra tahun rencana-(n+1) kedalam Renja PD tahun-(n+1) D = % Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD Tahun (n+1) kedalam Renja PD tahun (n+1) E = % Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD Tahun (n+1) ke dalam APBD Tahun (n+1) F = RPJMD mengacu pada RPJPD (ya = 100, tidak =0) G= RPJMD mengacu pada RTRW (ya = 100, tidak =0) H = RPJMD mengacu pada RPJMN (ya = 100, tidak =0) I = RPJMD mengacu pada RPJMD Provinsi (ya = 100, tidak =0) J = RPJMD mengacu pada KLHS (ya = 100, tidak =0) K = RKPD mengacu pada RKP (ya = 100, tidak =0) L = RKPD mengacu pada RKPD Prov. Sultra (ya = 100, tidak =0) n = Tahun LKjIP.

Sumber : Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022

Sasaran meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 12 (Dua belas) variable (komponen) yang meliputi Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD, Konsistensi Program RPJMD ke dalam Renstra PD, Konsistensi Program/ Kegiatan Renstra ke dalam Renja PD, Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD ke dalam Renja PD, Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD ke dalam APBD, RPJMD mengacu pada RPJPD , RPJMD mengacu pada RTRW, RPJMD mengacu pada RPJMN, RPJMD mengacu pada RPJMD Provinsi, RPJMD mengacu pada KLHS, RKPD mengacu pada RKP, dan RKPD mengacu pada RKPD Prov. Sultra.

Tabel 3.8.
Target kinerja sasaran meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2019

Notasi	Varibel/ Komponen	Triwulan				Tahunan
		I	II	III	IV	
A	% Konsistensi Program RPJMD tahun rencana 2020 ke dalam RKPDP tahun 2020	0	100	0	0	
B	% Konsistensi Program RPJMD ke dalam Renstra PD	100	0	0	0	
C	% Konsistensi Program/ Kegiatan Renstra PD tahun rencana 2020 ke dalam Renja PD Tahun 2020	0	100	0	0	
D	% Konsistensi Program/ Kegiatan RKPDP Tahun 2020 ke dalam Renja PD Tahun 2020	0	100	0	0	
E	% Konsistensi Program/ Kegiatan RKPDP Tahun 2020 ke dalam Program/ Kegiatan APBD 2020	0	0	0	100	
F	RPJMD mengacu pada RPJPD (ya = 100, tidak =0)	100	0	0	-	
G	RPJMD mengacu pada RTRW (ya = 100, tidak =0)	0	0	0	100	
H	RPJMD mengacu pada RPJMN (ya = 100, tidak =0)	100	0	0	0	
I	RPJMD mengacu pada RPJMD Provinsi (ya = 100, tidak =0)	100	0	0	0	
J	RPJMD mengacu pada KLHS (ya = 100, tidak =0)	100	0	0	0	
K	RKPDP 2020 mengacu pada RKP Tahun 2020 (ya = 100, tidak =0)	0	100	0	0	
L	RKPDP 2020 mengacu pada RKPDP Prov. Sultra Tahun 2020 (ya = 100, tidak =0)	0	100	0	0	
	Target Kinerja sasaran meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	27.43	53.71	-	18.86	100

Target kinerja dari sasaran meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2019 adalah sebesar 95%. Penetapan kinerja ini lebih besar 10% dari target tahun awal renstra (2017) yakni sebesar 85%, dan lebih rendah 5% dari target akhir renstra yakni 100%. Target Kinerja dan capaian kinerja sasaran meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

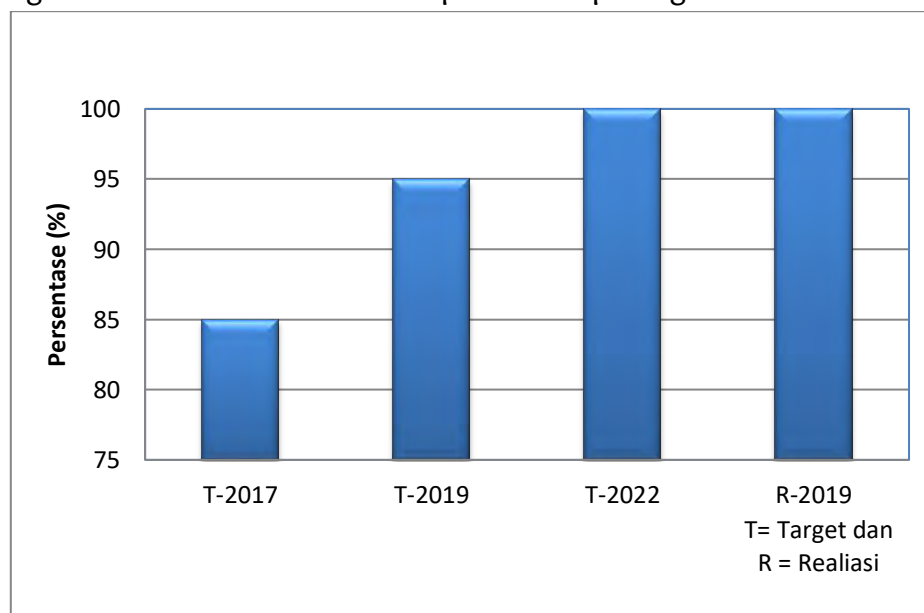
Tabel 3.9.
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Target Tahun Awal Renstra (2017)	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s.d 2019 terhadap target 2022
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	85	95	100	105,26	100	100

Realisasi capaian kinerja Bappeda Tahun 2019 adalah sebesar 105,35%. Dibanding dengan target tahun awal renstra, realisasi kinerja sasaran tahun 2019 adalah sebesar 117,65% dari target awal 2017.

Penghitungan indikator dilakukan dengan membandingkan antara indikator sasaran perangkat daerah pada tahun N yang tercapai dengan jumlah indikator sasaran secara keseluruhan pada RPJMD. Realisasi kinerja pada tahun 2019 terhadap target akhir renstra 2022 telah mencapai 100%, sehingga tingkat ketercapaian sasaran ini telah melampaui target yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan target akhir renstra 2022.

Target dan Realisasi Kinerja sasaran meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

Pengukuran capaian kinerja variable sasaran meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan selama 4 triwulan. Pengukuran kinerja pada triwulan I dilakukan pada komponen: Konsistensi Program RPJMD ke dalam Renstra PD (variabel B), RPJMD mengacu pada RPJPD (Variabel F), RPJMD mengacu pada RPJMN (Variabel H), RPJMD mengacu pada RPJMD Provinsi (Variabel I), dan RPJMD mengacu pada KLHS (Variabel J). Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil capaian tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja pada triwulan II dilakukan pada komponen: Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (Variable A), RKPD mengacu pada RKP (Variabel K) tahun 2019, RKPD mengacu pada RKPD Prov. Sultra (Variabel L).

Pengukuran kinerja pada triwulan III dilakukan pada komponen: Konsistensi Program/ Kegiatan Renstra ke dalam Renja PD (Variabel C), dan Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD ke dalam Renja PD (Variabel D).

Pengukuran kinerja pada triwulan IV dilakukan pada komponen: Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD ke dalam APBD (variabel E), dan RPJMD mengacu pada RTRW (Variabel G).

Hasil pengukuran 12 komponen kinerja sasaran meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah selama 4 (empat) triwulan ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 3.10.
Hasil Pengukuran 12 Komponen
Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2019

Notasi	Indikator Variabel/ Komponen	Triwulan				Tahunan
		I	II	III	IV	
A	% Konsistensi Program RPJMD tahun rencana 2020 ke dalam RKPD tahun 2020	0	100	0	0	100
B	% Konsistensi Program RPJMD ke dalam Renstra PD	100	0	0	0	100
C	% Konsistensi Program/ Kegiatan Renstra PD tahun rencana 2020 ke dalam Renja PD Tahun 2020	0	0	100	0	100
D	% Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2020 ke dalam Renja PD Tahun 2020	0	0	100	0	100
E	% Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2020 ke dalam Program/ Kegiatan APBD 2020	0	0	0	100	100
F	RPJMD mengacu pada RPJPD (ya = 100, tidak =0)	100	0	0	-	100
G	RPJMD mengacu pada RTRW (ya = 100, tidak =0)	0	0	0	100	100
H	RPJMD mengacu pada RPJMN (ya = 100, tidak =0)	100	0	0	0	100

Notasi	Indikator Variabel/ Komponen	Triwulan				Tahunan
		I	II	III	IV	
I	RPJMD mengacu pada RPJMD Provinsi (ya = 100, tidak =0)	100	0	0	0	100
J	RPJMD mengacu pada KLHS (ya = 100, tidak =0)	100	0	0	0	100
K	RKPD 2020 mengacu pada RKP Tahun 2020 (ya = 100, tidak =0)	0	100	0	0	100
L	RKPD 2020 mengacu pada RKPD Prov. Sultra Tahun 2020 (ya = 100, tidak =0)	0	100	0	0	100
	JUMLAH = [80% (A + B+C + D + E)/5] + 20% [(F+G H+I+J+K+L)/7]	27.43	21.71	32.00	18.86	100

a. Indikator Persentase Konsistensi Program RPJMD Tahun rencana 2020 ke dalam RKPD Tahun 2020.

RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan Perda Kabupaten Muna Barat No. 14 Tahun 2017, dan RKPD Kabupaten Muna Barat tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna Barat Tahun 2019.

Jumlah program yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 15 Program, dan jumlah program yang termuat dalam RKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 yang sesuai dengan program dalam RPJMD adalah sebanyak 13 Program. Dengan demikian tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebesar 114%. Analisis perhitungan indikator % Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD ditunjukkan pada tabel berikut.

Table 3.11.
Analisis Perhitungan Indikator % Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

No	Komponen/ Variabel Sasaran	Jumlah Program RPJMD Tahun rencana 2020	Jumlah Program RKPD Tahun 2020	Realisasi Capaian
1	% Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Program di tahun 2020 yg ada di rpjm dengan program yg ada di rkpd tahun 2020	-	-	C

b. Indikator % Konsistensi Program RPJMD ke dalam Renstra PD

Nomor	Perangkat Daerah	Jumlah Program OPD dalam RPJMD Tahun rencana 2020	Jumlah Program Renstra OPD Tahun 2020 sesuai RPJMD	Realisasi Capaian (%)
1	Dinas Pendidikan	12	12	100%
2	Dinas Kesehatan	23	25	109%
3	RSUD	12	12	100%
4	Dinas PU dan Penataan Ruang	17	19	112%
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8	9	113%
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	19	173%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	8	114%
8	Satuan Polisi Pamong Praja	8	9	113%
9	Dinas Sosial	8	10	125%
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	14	15	107%
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13	13	100%
12	Dinas Pertanian dan Pangan	19	21	111%
13	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9	12	133%
14	Sekretariat Daerah	19	20	105%
15	Sekretariat DPRD	6	6	100%
16	Inspektorat	5	5	100%
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13	13	100%
18	Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	11	12	109%
19	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7	7	100%
20	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	29	181%
21	Dinas Lingkungan Hidup	11	12	109%
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6	7	117%
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	11	11	100%
24	Dinas Perhubungan	11	12	109%
25	Komunikasi dan Informatika	11	19	173%
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	11	122%

27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	10	111%
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9	13	144%
29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10	11	110%
30	Kecamatan Barangka	7	7	100%
31	Kecamatan Kusambi	6	6	100%
32	Kecamatan Lawa	7	7	100%
33	Kecamatan Maginti	7	7	100%
34	Kecamatan Napano Kusambi	7	7	100%
35	Kecamatan Sawerigadi	7	7	100%
36	Kecamatan Tiworo Kepulauan	7	7	100%
37	Kecamatan Tiworo Selatan	7	7	100%
38	Kecamatan Tiworo Tengah	7	7	100%
39	Kecamatan Tiworo Utara	7	7	100%
40	Kecamatan Wadaga	7	7	100%
	JUMLAH	401	459	114%

c. Indikator RPJMD mengacu pada RPJPD

No	Sasaran RPJPD	Sasaran RPJMD	Keselaran	
			Sesuai/ Tidak	Nilai (sesuai=100, Tidak sesuai= 0)
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan ekonomi berbasis agropolitan dan minapolitan	1. Meningkatnya Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh; 2. Meningkatnya kapasitas produksi dan produktifitas sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan dalam upaya mendorong kesejahteraan petani dan kedaulatan serta ketahanan pangan daerah; 3. Meningkatnya Produksi dan produktivitas kemampuan pengelolaan Potensi Perikanan dan Kelautan; 4. Meningkatnya Nilai Tambah kemampuan pengelolaan Potensi Perikanan dan Kelautan; 5. Meningkatnya Peran Industri Sektor Unggulan Daerah dalam pengembangan ekonomi Lokal.	Sesuai	100
2	Tergalinya potensi-potensi wisata yang handal dan kearifan lokal sehingga dapat	1. Terwujudnya pengelolaan Pariwisata berkelanjutan; 2. Meningkatnya ragam ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan	Sesuai	100

No	Sasaran RPJPD	Sasaran RPJMD	Keselaran	
			Sesuai/ Tidak	Nilai (sesuai=100, Tidak sesuai= 0)
1	2	3	4	5
	dikembangkan dan dijaga kelestariannya	Perlindungan hak kekayaan Intelektual; 3. Terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah.		
3	Berkembangnya pasar rakyat dari hasil sumberdaya lokal	1. Meningkatnya Kemampuan Pasar menyerap Produk Sektor-Sektor Unggulan Daerah dengan Harga yang kompetitif 2. Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan barang Penting; 3. Meningkatkan Standardisasi dan perlindungan Konsumen	Sesuai	100
4	Berkembangnya sistem dan lembaga keuangan rakyat	1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan; 2. Meningkatnya Pelaku UMKM dalam membangun perekonomian lokal; 3. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan Koperasi untuk menopang perekonomian lokal; 4. Meningkatnya peran Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) dalam pengembangan ekonomi lokal.	Sesuai	100
5	Tersedianya infrastruktur transportasi darat, udara, dan laut yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah dalam mendukung Pengembangan Wilayah dan pemerataan Pembangunan	Sesuai	100
6	Terjadinya pemerataan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana transportasi.	Meningkatnya kemudahan akses terhadap Input Produksi dan Barang Kebutuhan Pokok	Sesuai	100
7	Tersedianya sistem drainase yang memadai baik secara kualitas dan kuantitas.	Meningkatnya pelayanan upaya pengurangan resiko bencana		100
8	Terpenuhinya kebutuhan akses telekomunikasi yang memudahkan masyarakat.	1. Meningkatkan Keterpaduan Sistem Informasi Industri Nasional ; 2. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat dan Kecerdasan Penggunaan Media Elektronik; 3. Meningkatnya kualitas pelayanan Peizinan dan Pendaftaran Perusahaan;	Sesuai	100

No	Sasaran RPJPD	Sasaran RPJMD	Keselaran	
			Sesuai/ Tidak	Nilai (sesuai=100, Tidak sesuai= 0)
1	2	3	4	5
		4. Meningkatnya kualitas pelayanan Peizinan Usaha Industri.		
9	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih layak minum		Tidak	0
10	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan listrik	Meningkatnya efisiensi pemanfaatan ketenagalistikan dan Bahan Bakar Minyak	Sesuai	100
11	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sesuai	100
12	Meningkatnya luas lahan bersertifikat	Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Rencana Tata Ruang yg berkelanjutan	Sesuai	100
13	Meningkatnya akses seluruh masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan	Terpenuhinya hak dasar masyarakat terhadap akses layanan Pendidikan yang berkualitas	Sesuai	100
14	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatnya Budaya Olahraga dan prestasi Olahraga	Sesuai	100
15	Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan	Terpenuhinya hak dasar masyarakat terhadap akses layanan Kesehatan yang berkualitas	Sesuai	100
16	Meningkatnya kecerdasan, kreativitas, ketrampilan, produktivitas dan kemandirian masyarakat	1. Meningkatnya Motivasi dan Peran Kepemudaan dalam mendorong daya saing pembangunan daerah; 2. Meningkatnya swadaya/partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan	Sesuai	100
17	Tersedianya tenaga produksi dan wirausaha masyarakat	1. Meningkatnya akses Kesempatan Kerja dan Peluang Kerja; 2. Meningkatnya Kompetensi Keahlian dan keterampilan Tenaga Kerja; 3. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja.	Sesuai	100
18	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Kualitas Keluarga Berencana, dan Kesejahteraan Keluarga	Sesuai	100
19	Menurunkan angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terhadap layanan Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Sesuai	100

No	Sasaran RPJPD	Sasaran RPJMD	Keselaran	
			Sesuai/ Tidak	Nilai (sesuai=100, Tidak sesuai= 0)
1	2	3	4	5
20	Tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang pemerintahan.	1. Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan Persampahan yang berkelanjutan; 2. Terwujudnya pengelolaan LH secara berkelanjutan.	Sesuai	100
21	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan yang profesional	1. Meningkatnya Kinerja Aparat pengawas internal pemerintah (APIP); 2. Meningkatnya tingkat kepuasan Pelayanan Publik	Sesuai	100
22	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sesuai	100
23	Terciptanya pemerintahan yang berlandaskan hukum dan adil	1. Meningkatnya nilai demokrasi dan Persatuan berbangsa dan Bernegara; 2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum berbasis prakarsa dan Kemitraan bersama antara Pemerintah dan Masyarakat; 3. Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sesuai	100
Nilai Rata-rata				95,65

d. RPJMD mengacu pada RTRW

No	Uraian	Penjelasan	RPJMD mengacu pada RTRW	
			Ada/ Tidak	Nilai (Ada=100, Tidak sesuai= 0)
1	Bagian substansi RPJMD yang mengacu RTRW	Dokumen Belum ada	Tidak	0

e. RPJMD mengacu pada RPJMN (ada di di Dokumen RPJM Muna Barat di awal)

No	Misi RPJMD	Agenda Pokok RPJMN	Keselaran	
			Sesuai/ Tidak	Nilai (sesuai=100, Tidak sesuai= 0)
1	Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur	1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Sesuai	100
2	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas	2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Sesuai	100
3	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan	3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Sesuai	100
4	Mengembangkan potensi wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal	4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Sesuai	100
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.	5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Sesuai	100
Nilai Rata-rata				100

f. RPJMD mengacu pada RPJMD Provinsi

No	Misi RPJMD Provinsi Tahun 2013-2018	Misi RPJMD	Keselaran	
			Sesuai/ Tidak	Nilai (sesuai=100, Tidak sesuai= 0)
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan takwa	Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur	Sesuai	100
2	Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi	1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan 2. Mengembangkan potensi wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal	Sesuai	100
3	Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat	Sesuai	100
4	Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas	Sesuai	100
Nilai Rata-rata				100

g. RPJMD mengacu pada KLHS

No	Uraian	Penjelasan	RPJMD mengacu pada RTRW	
			Ada/ Tidak	Nilai (Ada=100, Tidak sesuai= 0)
1	Bagian substansi RPJMD yang mengacu KLHS	KLHS sudah tervalidasi	Ada	100

h. RKPD mengacu pada RKP

No	Prioritas RKPD Tahun 2020	Prioritas RKP Tahun 2020	Keselaran	
			Sesuai/ Tidak	Nilai (sesuai=100, Tidak sesuai= 0)
1	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Terampil, Kuat, Berprestasi, Bermartabat dan Religius 2. Penurunan Angka Kemiskinan dan Peningkatan Perekonomian Daerah	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Sesuai	100
2	Peningkatan Infrastruktur Dasar Wilayah Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Sesuai	100
3	1. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai sektor basis perekonomian daerah 2. Pengembangan potensi pariwisata dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Sesuai	100
4	Peningkatan Infrastruktur Dasar Wilayah Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Sesuai	100

No	Prioritas RKPD Tahun 2020	Prioritas RKP Tahun 2020	Keselaran	
			Sesuai/ Tidak	Nilai (sesuai=100, Tidak sesuai= 0)
5	1. Peningkatan Kemitraan Pemerintah, Aparat Pengamanan dan Kelompok Masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik yang Prima melalui Reformasi Birokrasi	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Sesuai	100
Nilai Rata-rata				100

i. RKPD mengacu pada RKPD Provinsi Sultra

No	Prioritas RKPD Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Tahun 2020	Keselaran	
			Sesuai/ Tidak	Nilai (sesuai=100, Tidak sesuai= 0)
1	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Terampil, Kuat, Berprestasi, Bermartabat dan Religius 2. Penurunan Angka Kemiskinan dan Peningkatan Perekonomian Daerah	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Pemerataan Akses terhadap Pelayanan Dasar	Sesuai	100
2	Peningkatan Infrastruktur Dasar Wilayah Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Wilayah untuk Mendukung Konektivitas	Sesuai	100
3	1. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai sektor basis perekonomian daerah	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor-sektor Unggulan	Sesuai	100

No	Prioritas RKPD Tahun 2020	Prioritas RKPD Provinsi Tahun 2020	Keselaran	
			Sesuai/ Tidak	Nilai (sesuai=100, Tidak sesuai= 0)
	2. Pengembangan potensi pariwisata dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif			
4	Peningkatan Infrastruktur Dasar Wilayah Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi	Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Wilayah untuk Mendukung Konektivitas	Sesuai	100
5	1. Peningkatan Kemitraan Pemerintah, Aparat Pengamanan dan Kelompok Masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik yang Prima melalui Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Sesuai	100
Nilai Rata-rata				100

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

- Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan etos kerja yang tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan penelitian.
- Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda
- Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.
- Ketersediaan data-data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program dan kegiatan.
- Adanya penegasan dari tim koordinasi, supervisi, dan penanggulangan korupsi oleh KPK khususnya berkaitan dengan aspek perencanaan pembangunan.

3.2.3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda

Tolok ukur capaian Sasaran meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda diukur dengan 2 (dua) indikator. Indikator tersebut adalah Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda tahun sebelumnya dan persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti. Penjelasan hubungan sasaran dan indikator adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Pengukuran
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda tahun sebelumnya	Nilai Evaluasi Sakip Bappeda Tahun sebelumnya
		Rata-rata capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Jumlah Nilai SKP- ASN Bappeda/ Jumlah ASN Bappeda x 100
		Tingkat ketaatan terhadap hasil evaluasi/ pemeriksaan BPK dan APIP	20% A + 40% B + 40% C A = persen tindaklanjut hasil evaluasi SAKIP oleh APIP B= Tindaklanjut temuan BPK atas LHP C= Tindaklanjut temuan APIP atas LHP

Tabel 3.12.

Target Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda Triwulan I, II, III, IV pada Tahun 2019

No	Indikator	Triwulan				Tahunan
		I	II	III	IV	
1	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda tahun sebelumnya	X	0	0	0	X
2	Rata-rata capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	0	0	0	X	X
3	Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	X	0	Y	0	XY

Target kinerja dari sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan yang dimanfaatkan untuk pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dan cepat tumbuh pada tahun 2019 sebanyak 1 Dokumen yakni rencana Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, Target Kinerja dan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cepat Tumbuh dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda
Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Target Tahun Awal Renstra (2017)	Target	Realisasi	% Realisasi	Target 2022	% Realisasi 2022
1	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda tahun sebelumnya (2018)	CC (55)	B (65)	70	107,69%	A (85)	100
2	Rata-rata capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	80	84	84,72	100,96%	90	100
3	Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100

a. Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda tahun sebelumnya

Hasil evaluasi SAKIP ditetapkan dengan predikat AA untuk nilai 90 – 100, A untuk nilai 80 – 90, BB untuk nilai 70 – 80, B untuk nilai 60 – 70, CC untuk nilai 50 – 60, C untuk nilai 30 – 50, dan D untuk nilai 0-30.

No	Indikator	Target	Realisasi	Nilai Capaian
1	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda tahun sebelumnya (2018)	B (65)	70	107,69%

b. Rata-rata capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

No	Nama ASN	Target SKP	Realiasi SKP	Nilai Capaian SKP
1	Raden Djamun Sunjoto, S.PD.,M.SI. (NIP. 19960804 199003 1 012)	86	87,25	101,45
2	Nasir, SKM,M.Si (NIP. 19751121 20003 1 007)	85	86,84	102,16
3	Mukhtar, S.Pd,M.Sc. (NIP. 19700815 199303 1 012)	84	84,42	100,50
4	La Ode Khairul Ashar, ST,M.Sc (NIP. 19781003 200502 1 002)	84	84,47	100,56
5	Ucok Heriady Ridwan, ST,M.Sc (NIP. 19750627 200604 1 009)	84	84,48	100,57
6	Mahmed Milan Zulkifli, STP (NIP. 19821128 200502 1 002))	84	85,80	102,14
7	Deni Andriawati, S.Hut (NIP. 19790428 200003 2 001	84	83,26	99,12
8	Nursyamsu Abubakar, ST (NIP. 19830815 201101 1 008)	84	84,52	100,62
9	Ld. Muh. Yusuf Manggasa,S.Hut (NIP. 19840121 201407 1 001)	80	82,22	102,78
10	Karsaid Udo (NIP. 19670729 200701 1 025)	84	84,36	100,43
11	Irawan Ikhlas Manguntu (NIP. 19820531 200502 1 003	84	84,26	100,31
Jumlah		923	931,88	100,96%

c. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti

Notasi	Uraian	Jumlah Temuan/ Hasil Evaluasi	Jumlah temuan/ hasil evaluasi ditindak-lanjuti	Nilai Capaian
A	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	0	0	100
B	Jumlah temuan LHP BPK Tahun 2018	0	0	100
C	Jumlah temuan LHP APIP Tahun 2018	0	0	100
Jumlah				(0,2A + 0,4B +0,4C)

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar Rp 5.817.983.238,- (96,15%) dari total anggaran sebesar Rp 6.702.749.239,-. Adapun rincian realisasi anggaran yang dikelola Bappeda kabupaten Muna Barat Tahun 2019 sebagai berikut.

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp 5.817.983.238,- (93,05%);
2. Belanja langsung sebesar Rp 5.817.983.238,- (96,15%);

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14.
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran
Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Tar-get	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkanya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh	Jumlah perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten yang terbangun sesuai masterplan	3	1	33,33	0	0	0
2	Meningkatnya Kualitas Perencanan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya	100	100	100	3.501.400.000	3.439.438.703	98,23
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda tahun sebelumnya	65	70	107,69	2.549.600.000	2.378.544.535	93,29
		Rata-rata capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	84	84,72	100,9			
		Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	100	100	100			
	Belanja Langsung					6.051.000.000	5.817.983.238	96,15
	Belanja Tidak Langsung					950.839.000	884.766.001	93,05
	Jumlah					7.001.839.000	6.702.749.239	95,73

3.4. Analisis Efisiensi

Tingkat efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi digambarkan besarnya rasio antara persentase penyerapan anggaran dan persentase capaian kinerja sasaran. Kinerja sasaran strategis Bappeda Kabupaten Muna Barat telah **melebihi** target yakni sebesar 107,69% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 93,29%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan **proses bisnis**, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana. Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.15.
Analisis efisiensi Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	(6) = (5)/ (4)
(1)	Meningkannya Perencanaan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten dan Cempat Tumbuh	Jumlah perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten yang terbangun sesuai masterplan	0	0	0
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda	Nilai Evaluasi Sakip Bappeda tahun sebelumnya	107,69%	93,29	0,87
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen lainnya	105	98,23	0,94

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

4.1. Simpulan

Hasil laporan kinerja Bappeda tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Bappeda telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 107,69 %, dengan efisiensi anggaran sebesar 93,29%
2. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat, dan instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan yang masih bersifat kuantitatif.

4.2. Saran

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card (BSC)* yang meliputi pendekatan *customer perspective, internal process, financial perspective, dan learning and growth perspective*.

LAMPIRAN